



**PERUBAHAN
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DAERAH
(P - RKPD)**

**Kabupaten
Bolaang Mongondow**

Tahun 2025



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **13** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. BAB I yang memuat pendahuluan;
 - b. BAB II yang memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
 - c. BAB III yang memuat kerangka ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. BAB V yang memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI yang memuat penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD tahun 2025 dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- (2) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.



- (3) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025
NOMOR..13

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Dokumen P-RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045, dan sudah mengakomodir Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 serta RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.

Sesuai fungsinya, Dokumen P-RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran P-RAPBD Tahun anggaran 2025. Untuk itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/penyelarasan rencana program hingga pelaksanaannya. Semoaga dokumen Perubahan RKPD ini akan memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dan juga bisa mempercepat pencapaian target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Dokumen P-RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENGANGGARAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KAB. BOLAANG MONGONDOW**



DR. MUTU BULAN MOKOGINTA, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710409 199803 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I -1
1.1 Latar Belakang.....	I -1
1.2 Dasar Hukum.....	I -4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I -6
1.4 Maksud dan Tujuan	I -7
1.5 Sistematika Dokumen.....	I -8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	II -10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II -10
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III -137
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III -137
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III -151
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV -173
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV -173
4.2 Tema Pembangunan Tahun 2025	IV -183
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V -206
BAB VI PENUTUP.....	VI -439

DAFTAR TABEL

2.1.	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	12
2.2.	Rincian Jenis Belanja APBD Murni dan Pergeseran.....	12
2.3.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	14
2.4.	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025	18
2.5.	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 Triwulan I	20
3.1.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow	140
3.2.	Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Bolaang Mongondow 2022-2024.....	146
3.3.	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow	147
3.4.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow.....	155
3.5.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Bolaang Mongondow.....	160
3.6.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pebiayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.....	162
3.7.	Proyeksi Target Belanja Perubahan RKPD Tahun 2025.....	168
3.8.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.....	172
4.1.	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029.....	178
4.2.	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow	182
4.3.	Keselarasn Isu Strategis, prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2025.....	189
4.4.	Keselarasn Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, serta Tujuan RPD dan sasaran serta Prioritas Pembangunan Tahun 2025	192
4.5.	Keselarasn Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025	194

4.6.	Keselarasan Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025	196
4.7.	Indikator kinerja Tujuan Tahun 2025	199
4.8.	Indikator kinerja Sasaran Tahun 2025	199
4.9.	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.....	201
5.1.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025.....	207

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	7
3.1	PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024	139
3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Proyeksi LPE Tahun 2025	141
3.3	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.....	142
3.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	143
3.5	PDRB Perkapitan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024	144
3.6	Rasio Gini Kab. Bolaang Mongondow 2021-2024.....	148
4.1	Keselarasn Asta Cita dan Misi Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029.....	174
4.2	Keselarasn Tujuan Kepala Daerah Terpilih dan Tujuan Tujuan RPD tahun 2023-2026.....	181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk Menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan surat edaran tersebut, ketentuan dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan sehubungan dengan pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam

rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah kedalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Selain itu, juga ditekankan agar pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program **Asta Cita** ke dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan (P-RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 merupakan merupakan tahun ketiga dari RPD Tahun 2023-2026. Sebagaimana ditetapkan dalam RPD tersebut tema prioritas pembangunan tahun 2025 adalah pada **“Memaksimalkan Kontribusi Pertanian Industri Dan Pariwisata didukung sarana prasarana dan SDM yang memadai dan berkelanjutan”**.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun berjalan 2025, dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai triwulan I tahun berjalan yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow. dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Belum sinerginya penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita presiden dan wakil presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

2. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi Kerangka Keuangan Daerah yang berdampak terhadap penyesuaian Anggaran Tahun 2025.
3. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan yakni adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan dan penambahan kegiatan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 ini akan menjadi pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah yang memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, meliputi:

- 1) Mewujudkan pencapaian tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional tahun 2025
- 2) Mewujudkan Pencapaian prioritas pembangunan tahun ketiga berdasarkan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026.
- 3) Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai sesuai visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- 4) Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya ;
- 5) Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
- 6) Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran APBD-Perubahan (KUA-APBD-P) tahun 2025, Prioritas dan plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2025, dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi

Perangkat Daerah (RKAP-OPD) tahun 2025, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2025. Serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Provinsi) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20205;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

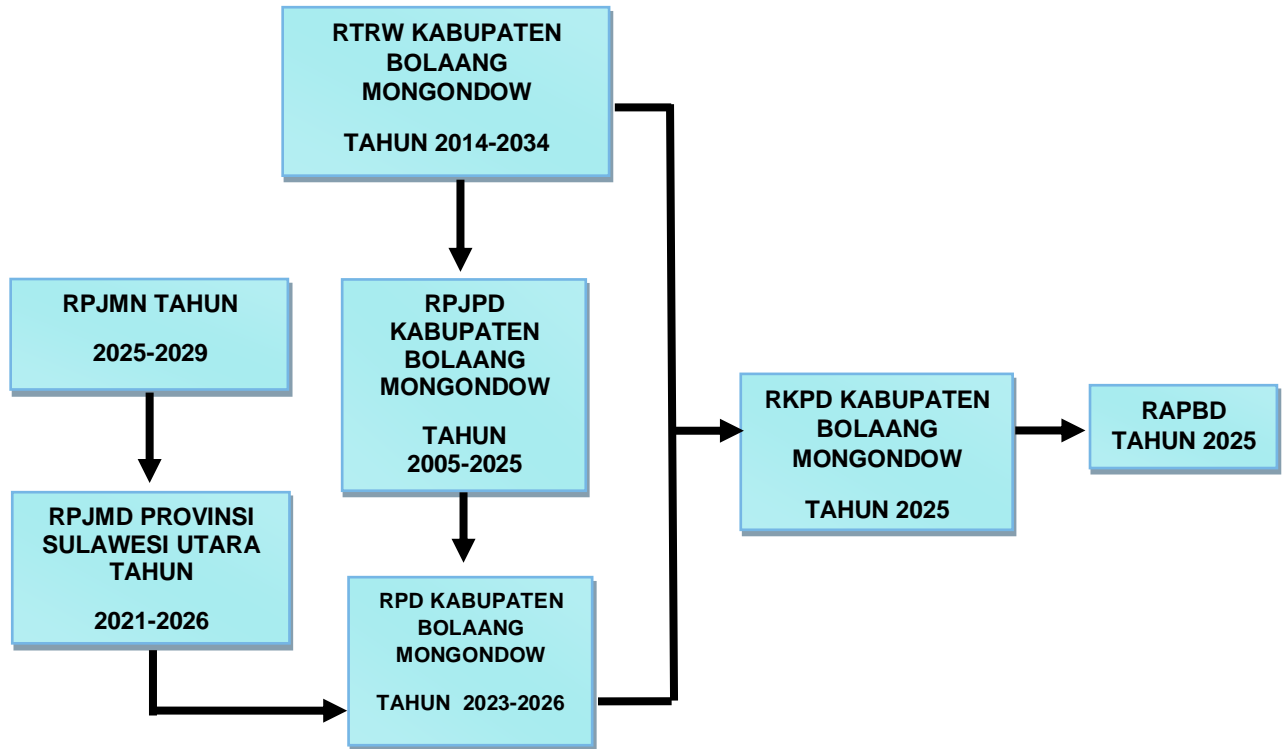
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada penjabaran dari RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045, RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045, dan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.

Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama - sama diacu oleh RKPD.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;

3. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
4. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
5. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 348 ayat (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 347 huruf a, mencakup:
 - a. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan triwulan II (dua) tahun berkenaan;
 - c. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
 - e. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
2. Pasal 349 ayat (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 348, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
- c. BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
- f. BAB VI Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Perencanaan Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, hasil evaluasi RKPD tahun 2025 dan capaian kinerja RKPD tahun 2024, pokok pokok pikiran / jaring aspirasi Masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping itu dalam penentuan prioritas Pembangunan juga memperhatikan sasaran Pembangunan nasional yang tertuang kedalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Selain itu, pelaksanaan Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, dengan memperhatikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, serta menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program **Asta Cita** ke dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Tema dan prioritas tahun anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 adalah **“Memaksimalkan Kontribusi Pertanian Industri Dan Pariwisata didukung sarana prasarana dan SDM yang memadai dan berkelanjutan”**. Adapun prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas serta berwawasan lingkungan;
2. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Penguatan Koperasi, UMKM dan Industri pengolahan;
5. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja;
6. Optimalisasi dana desa untuk pengembangan perekonomian desa;
7. Peningkatan infrastruktur dasar;
8. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
10. Ketersediaan dan distribusi pangan;
11. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Untuk mengetahui Tingkat capaian terhadap target program dan kegiatan Pembangunan daerah dalam RKPD perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan

triwulan I tahun 2025. Berikut adalah data jumlah program, kegiatan serta sub kegiatan Perangkat daerah dan Pagu belanja tahun 2025.

Tabel 2.1.

Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan		
RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	108	108	202	202	202	461	461	

Pada perubahan RKPD tahun 2025 tidak terdapat penambahan program kegiatan jika disandingkan dengan APBD tahun 2025, namun pada sub kegiatan terjadi penambahan jika dilihat pada apbd induk.

Tabel 2.2.

Rincian jenis belanja APBD murni dan Pergeseran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERGESERAN	
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	870.722.797.448,78	830.347.895.819,20	-40.374.901.629,58
5.1.01	Belanja Pegawai	559.128.603.503,90	561.193.502.823,90	2.064.899.320,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.205.727.474,88	253.317.989.045,30	-39.887.738.429,58
5.1.05	Belanja Hibah	17.878.127.500,00	15.618.357.500,00	-2.259.770.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	510.338.970,00	218.046.450,00	-292.292.520,00
5,2	BELANJA MODAL	104.368.830.828,22	107.424.638.457,80	3.055.807.629,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.435.657.366,22	32.652.417.204,80	1.216.759.838,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.635.435.190,00	49.113.508.577,00	10.478.073.387,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.253.757.522,00	24.808.229.676,00	-8.445.527.846,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	825.283.000,00	825.283.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	218.697.750,00	0,00	-218.697.750,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	236.502.334.924,00	236.502.334.924,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.808.491.224,00	6.808.491.224,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	229.693.843.700,00	229.693.843.700,00	0,00

Jumlah Belanja	1.216.593.963.201,00	1.177.274.869.201,00	-39.319.094.000,00
----------------	----------------------	----------------------	--------------------

Dalam pergeseran anggaran APBD Tahun 2025 untuk jumlah belanja terjadi perubahan saat dilakukan pergeseran dari semula Rp. 1.216.593.201,00 berkurang Rp -39.319.094.000,00 atau sebesar 1.177.274.869.201,00. Sejumlah pergeseran yang terjadi pada rincian belanja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi yang semula Rp 870.722.797.448,78 berkurang Rp -40.374.901.629,58 atau menjadi Rp 830.347.895.819,20 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai meningkat sebesar Rp 2.064.899.320,00 menjadi Rp 561.193.502.823,90 dari belanja awal sebesar Rp. 599.128.603.503.
 - b. Belanja Barang dan Jasa berkurang Rp -39.887.738.429,58 menjadi Rp. 253.317.989.045,30 dari semula sebesar Rp. 293.205.727.474,88
 - c. Belanja Hibah juga berkurang sebesar Rp -2.259.770.000,00 menjadi Rp. 15.618.357.500,00 dari belanja awal sebesar Rp. 17.878.127.500,00.
 - d. Belanja Bantuan sosial juga mengalami pengurangan sebesar Rp -292.292.520,00 menjadi Rp. 218.046.450,00 dari semula Rp. 510.338.970,00.
2. Belanja Modal dari semula Rp. 104.368.830.828,22 menjadi Rp. 107.424.638.457,80 atau bertambah sebesar Rp. 3.055.807.629,58.
3. Untuk Belanja Tidak terduga berkurang sebesar Rp - 2.000.000.000,00 menjadi sebesar 3.000.000.000,00 dari belanja semua sebesar 5.000.000.000,00.
4. Belanja transfer tetap yaitu sebesar Rp. 236.502.334.924,00.

Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari dokumen RPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026. Realisasi Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran daerah terdiri dari

17 indikator sasaran daerah. Adapun capaian kinerja yang sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$) yakni Indeks Pendidikan, Rata-rata Usia Harapan Hidup, Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pelayanan Publik dan Rasio Pangan. Untuk indikator yang capaian kinerjanya tinggi ($76\% \leq 90\%$) yakni Angka Kemiskinan, Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik, serta Indeks Tutupan lahan. sementara capaian kinerjanya sedang ($66\% \leq 75\%$) yakni Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Untuk capaian kinerjanya rendah ($51\% \leq 65\%$) yakni Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan dan Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 masih menunggu rilis dari pihak terkait.

. Berikut capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bolaang mongondow dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	Kinerja	Factor Pendorong/ Penghambat
1	INDEKS PENDIDIKAN	TAHUN	13,70	13,70	100,00%	Indeks Pendidikan tercapai karena meningkatnya angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). hal ini juga didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas sarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta kebijakan dan program pemerintah yang mendukung
2	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	ANGKA	69,65	70,31	100,95%	Usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendorong utama meningkatnya usia harapan hidup terkait akses ke layanan kesehatan, kualitas lingkungan, hidup sehat, kondisi sosial ekonomi, dan kesehatan keluarga
3	ANGKA KEMISKINAN	PERSEN	6,75	7,74	87,21%	Kemiskinan 2024 meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah pendapatan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	Kinerja	Factor Pendorong/ Penghambat
						(Rp/Kapita/bulan), Tingkat pengangguran, terutama di kalangan usia produktif, serta penurunan pendapatan keluarga dan peningkatan angka kemiskinan selain itu dibutuhkan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala untuk memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
4	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	ANGKA	24,09	15,3	63,51%	Fasilitas keselamatan jalan masih sangat minim pada ruas ruas jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow menyebabkan tingginya kecelakaan lalu lintas, serta belum adanya penataan / inventarisasi daerah Black Spot, dalam penerapan analisis dampak lalu lintas belum dilaksanakan di wilayah daerah rawan kecelakaan
5	PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	PERSEN	69	56,51	81,90	Persentase Panjang jalan dengan kondisi baik belum tercapai karena adanya perubahan Panjang jalan Kabupaten tahun 2022 sepanjang 509,21 menjadi 682,71 di tahun 2023
6	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	PERSEN	73,2	68,63	93,76	Rumah tangga dengan akses air minum layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang aman dan memenuhi kriteria kualitas air minum, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Penyediaan air minum layak bagi seluruh rumah tangga belum tercapai, terutama di daerah terpencil dan dengan kondisi geografis yang sulit
7	INDEKS KUALITAS AIR	ANGKA	55	55	100,00	Meskipun target tercapai akan tetapi nilai 55 pada indeks kualitas air dikategorikan sedang, sehingga kondisi tersebut perlu membutuhkan penanganan yang serius dari seluruh stakeholder
8	INDEKS KUALITAS UDARA	ANGKA	95,43	93,13	97,59	Angka Indeks kualitas udara pada capaian kinerja sudah pada kategori sangat baik sesuai dengan Permen LHK nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, meski demikian pengambilan sample pada kondisi udara di wilayah bolaang mongondow harus lebih banyak, tahun 2024 sample udara yang diteliti hanya pada 4 titik.
9	INDEKS TUTUPAN LAHAN	ANGKA	75	61,4	81,87	belum tercapai karena kekurangan data luasan lahan dalam pelaksanaan penelitian oleh Kementerian lingkungan hidup

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	Kinerja	Factor Pendorong/ Penghambat
10	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	10,3	6,95	67,48	Faktor penghambat kontribusi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Bolaang Mongondow dapat mencakup berbagai hal seperti keterbatasan modal, infrastruktur yang belum memadai, akses pasar yang terbatas, kurangnya tenaga kerja terampil, regulasi yang belum mendukung. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku, persaingan yang ketat dengan produk impor, dan masalah lingkungan juga dapat menjadi faktor penghambat.
11	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	2	6,85	342,50	Sektor pertanian dan perikanan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui penyediaan pangan, bahan baku industri, dan lapangan kerja. Hal ini ditambah dengan potensi pertanian dan perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow yang terus diperhatikan sebagai lumbung beras atau pangan di wilayah Sulawesi utara
12	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PERSEN	10	6,29	62,90	Belum adanya investasi baru yang masuk di wilayah kabupaten bolaang mongondow mengakibatkan capaian kinerja belum tercapai. realisasi investasi pada tahun 2024 hanya merupakan tambahan investasi dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya, karena ada beberapa kendala yaitu : 1. Belum adanya revisi perda RTRW sehingga tidak bisa terbit PKKPR untuk lahan – lahan yang merupakan lahan basah 2. Proses penerbitan PKKPR melibatkan instansi ATR/BPN , sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk penerbitannya
13	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ZONA	KUNING (80)	Hijau (95,14)	119	Factor pendorong yakni Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkala, perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan internal.
14	OPINI BPK	OPINI	WTP	WTP	100	Hal ini di dorong oleh penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Bolaang Mongondow telah sesuai dengan standar akuntansi dan tidak ada temuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	Kinerja	Factor Pendorong/ Penghambat
						signifikan yang perlu dikhawatirkan.
15	NILAI SAKIP	PREDIKAT	BB	B	90	Telah dilaksanakan Upaya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, baik itu perbaikan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan level pmda maupun perangkat daerah, serta terdapat pedoman teknis perencanaan yang disusun pada peraturan bupati Bolmong Nomor 2 tahun 2023, hasil terhadap evaluasi AKIP menunjukkan nilai 65,35 dengan predikat B yang menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kerja
16	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ANGKA	3.6	Belum dirilis	Belum dirilis	Kemendagri melaksanakan evaluasi setiap tahun secara rutin dengan menggunakan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota setiap tahunnya. LPPD belum Kembali di rilis
17	RASIO PANGAN	ANGKA	1,14	1,10	96,49	Kabupaten Bolaang Mongondow tahan dan terjamin akan kebutuhan pangan pada tahun 2024, berbagai Upaya yang dilakukan. Untuk mencapai rasio 1,2 perlu adanya Regulasi Pemerintah Daerah untuk menata ketersediaan pangan pokok (beras), anjuran nasional seperti halnya untuk alur distribusi pangan pokok beras (stok pangan di daerah), untuk mengantisipasi ketimpangan stok pangan pokok beras yang ada didaerah guna memudahkan mengantisipasi gejolak harga saat ini dimana pada tahun 2024 adanya inflasi ekonomi berdampak terhadap harga pangan. Pengembangan Lumbung Pangan dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diharapkan dapat optimal.

Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Bolmong, 2025

Tingkat capaian pelaksanaan kinerja RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 diperoleh rata-rata Tingkat capaian sebesar 20,97 %. data capaian kinerja dan anggaran RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4. Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Kabupaten/ Kota	Triwulan	Rata-rata Capaian Kinerja		Predikat	
		Kinerja %	Realisasi Anggaran %	Kinerja %	Realisasi Anggaran %
Kabupaten Bolaang Mongondow	I	20,97	17,63	rendah	sangat rendah

Sumber: Badan Keuangan Daerah 2025

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 antara lain :

1. Adanya perubahan rincian spesifikasi barang pada DPA menyebabkan mundurnya pengadaan sarana prasarana ;
2. Adanya keterlambatan PD dalam melakukan penyusunan dokumen pengadaan sehingga proses pengadaan pada LPSE mundur dari jadwal yang direncanakan;
3. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Bolaang Mongondow.

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
2. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan sumber dana lainnya
4. Adanya penilaian kinerja PD yang dilakukan sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing PD

Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :

1. Perubahan anggaran kas serta nilai keuangan diikuti juga dengan penyesuaian Rencana Pelaksanaan Kegiatan dengan mempertimbangkan seluruh keluaran sesuai dengan pembobotan nilai keuangan.
2. Tingkat serapan anggaran yang masih rendah masih perlu ditingkatkan, dengan percepatan pelaksanaan kegiatan karena kegiatan yang tidak tepat waktu berpotensi dengan pelaksanaan pada periode berikutnya.
3. Mendorong PD untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja melalui refocusing anggaran belanja yang tidak dapat dilaksanakan.
4. Terhadap kegiatan yang tertunda pelaksanaannya atau tidak bisa dilaksanakan di Tahun 2024 perlu dijadikan catatan khusus untuk dipertimbangkan dapat dilanjutkan dalam perubahan perencanaan tahun 2025
5. Penyesuaian sub kegiatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik agar disesuaikan pada perubahan perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian/Lembaga;
7. Setiap PD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi pengendalian eMonev

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan RKPD berikutnya antara lain :

1. Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPJMD tahun 2025-2026 sesuai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang akan segera ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar memperhatikan manfaat (output) dan dampak (impact) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif dengan mendukung capaian output yang berkualitas
4. Perangkat Daerah agar mengoptimalkan pemanfaatan output sub kegiatan / kegiatan dan melakukan evaluasi dampak (outcome) dari sub kegiatan / kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut APBD Tahun 2025 dan realisasi sampai triwulan I ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Realisasi Pendapatan Belanja dan pembiayaan Triwulan I
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

KODE	URAIAN	APBD 2025	REALISASI SAMPAI TRIWULAN I TA 2025
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.484.912.239,00	15.594.097.191,75
4.1.01	Pajak Daerah	49.610.937.239,00	11.080.161.134,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.473.975.000,00	3.267.942.082,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.000.000,00	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.600.000.000,00	1.245.993.975,75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.094.388.305.188	216.501.157.386
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.059.598.768.000	216.501.157.386
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.789.537.188	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.658.800.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.658.800.000	0
	Jumlah Pendapatan	1.177.532.017.427,00	232.095.254.578
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	870.722.797.448,78	132.950.817.689
5.1.01	Belanja Pegawai	559.128.603.503,90	112.159.333.454
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.205.727.474,88	20.791.484.235
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	17.878.127.500	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	510.338.970	0
5.2	BELANJA MODAL	104.368.830.828,22	272.268.016
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.435.657.366,22	272.268.016
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.635.435.190,00	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.253.757.522,00	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	825.283.000	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	218.697.750	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	236.502.334.924,00	24.318.056.770
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.808.491.224,00	1.984.194.090
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	229.693.843.700,00	22.333.862.680
	Jumlah Belanja	1.216.593.963.201	157.541.142.475
	Total Surplus/(Defisit)	-39.061.945.774	74.554.112.102,75
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.061.945.774	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.061.945.774	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	39.061.945.774	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Pembiayaan Netto	39.061.945.774	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0

Data evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah triwulan I Tahun 2025, yang bersumber dari Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada lampiran tabel 2.5 berikut ini:

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah adalah fondasi yang mengatur bagaimana suatu daerah mengelola sumber daya ekonominya dan keuangan publiknya. Hal ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta pengkoordinasian kebijakan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas Pembangunan serta mengambil Langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai program dan kegiatan yang ditargetkan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Capaian Kinerja Makro merupakan aspek pengukuran kinerja pemerintah pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kebijakan makro ekonomi daerah terkait langsung dengan turunan kebijakan bidang sektoral yang umum dilakukan pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah, kebijakan bidang fiskal yang dibahas bersama eksekutif dan legislatif dan ditetapkan oleh legislatif, dan kebijakan bidang kawasan dan kebijakan bidang regulasi dan kelembagaan. Kondisi perekonomian daerah tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global sehingga melalui indikator makro dapat dilihat perkembangan perekonomian

daerah. Capaian indikator ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

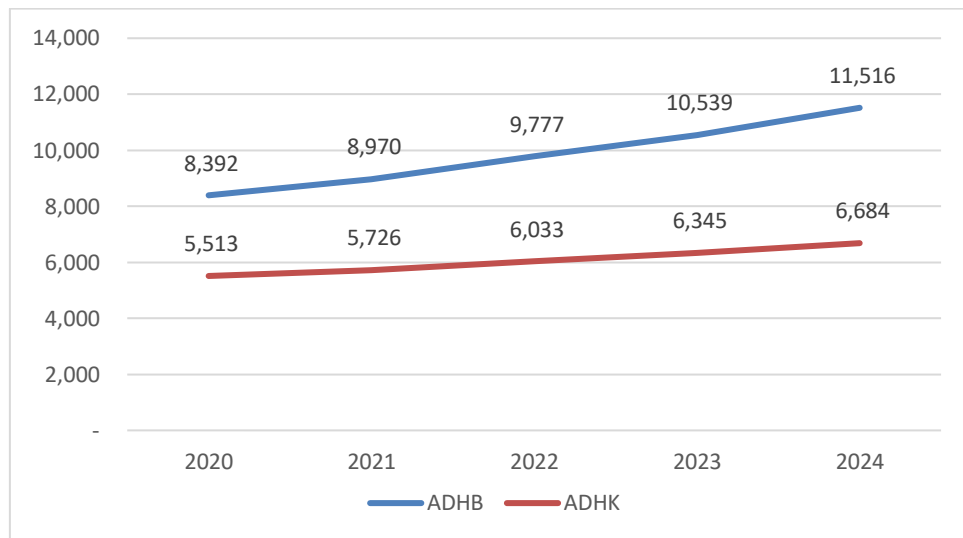
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bolaang Mongondow Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2024 mencapai 11,52 triliun rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 6,68 triliun rupiah. Dari 17 kategori, Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, yaitu mencapai 40,49 persen, diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,56 persen. Sebaliknya, kontribusi Jasa Perusahaan hanya 0,03 persen dan merupakan andil yang paling kecil.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Berikut nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1 PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.



Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2025

Pada distribusi persentase PDRB selama periode 2020-2024 perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow selalu didominasi oleh 5 sektor lapangan usaha yakni Pertanian kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan.

Pada sektor Pertanian kehutanan dan Perikanan nilai distribusi tahun 2024 sebesar 40,49 persen bertambah 0,71 persen dari tahun 2023, selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran ;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2024 mencapai 10,41 persen bertambah 0,2 persen dari tahun 2023, sektor Konstruksi sebesar 10,41 persen tahun 2024 turun 0,21 persen dari tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,86 persen menurun 0,15 dari tahun 2023 dan yang terakhir dari sektor industry pengolahan sebesar 6,95 persen turun 0,64 persen dari tahun 2023.

Gambaran tentang distribusi nilai masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2020-2024 Kabupaten Bolaang Mongondow

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,02	40,15	40,46	39,78	40,49
Pertambangan dan Penggalian	10,21	11,3	10,83	10,01	9,86
Industri Pengolahan	6,78	7,29	7,52	7,59	6,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08
Konstruksi	10,45	10,71	10,48	10,62	10,41
Perdagangan Besar dan Eceran ;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,09	11,3	11,62	12,36	12,56
Transportasi dan Pergudangan	1,82	1,78	1,91	2,24	2,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39
Informasi dan Komunikasi	0,58	0,57	0,55	0,57	0,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	1,13	1,05	0,97	0,93
Real Estate	4,55	4,38	4,2	4,17	4,11
Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,34	3,25	3,11	3,13	3,13
Jasa Pendidikan	4,79	4,79	4,88	5,00	5,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,24	2,24	2,36	2,37
Jasa Lainnya	0,54	0,54	0,54	0,60	0,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

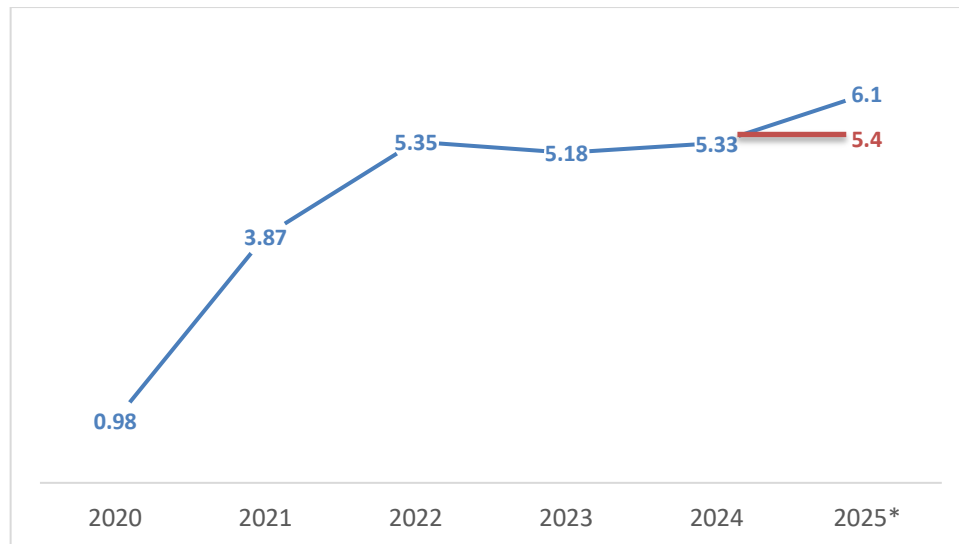
Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2025

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Secara konsepsi PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan Masyarakat. Olehnya PDRB merupakan Gambaran

nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan Pembangunan ekonomi.

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Proyeksi LPE Tahun 2025.



Sumber : BPS Kabupaten Bolmong 2025

*Proyeksi Bappeda Kab. Bolaang Mongondow

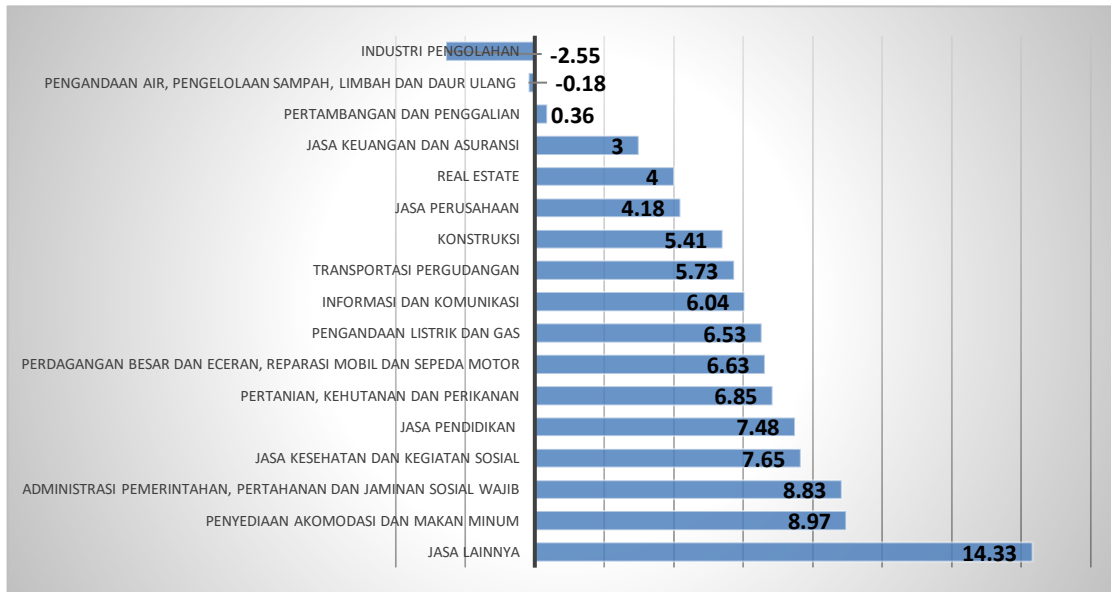
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 melalui upaya pemulihan ekonomi terlihat dengan pertumbuhan sebesar 3,87 persen dan terus merangkak naik pada tahun 2022 dengan peningkatan mencapai 5,35 persen. Namun di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami sedikit perlambatan dengan Tingkat pertumbuhan sebesar 5,18 persen dan terus bertumbuh pada tahun 2024 sebesar 5,33 atau bertambah sebesar 0,15 persen.

Pertumbuhan paling tinggi adalah untuk sektor Jasa Lainnya sebesar 14,33 persen, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,97 persen serta sektor Administrasi pemerintahan pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 8,83. Sedangkan sektor terendah pada kategori Industri Pengolahan sebesar -2,55 dan diikuti

sektor Pengandaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mencapai -0,18 persen.

Gambaran capaian setiap sektor usaha ditampilkan sebagai berikut :

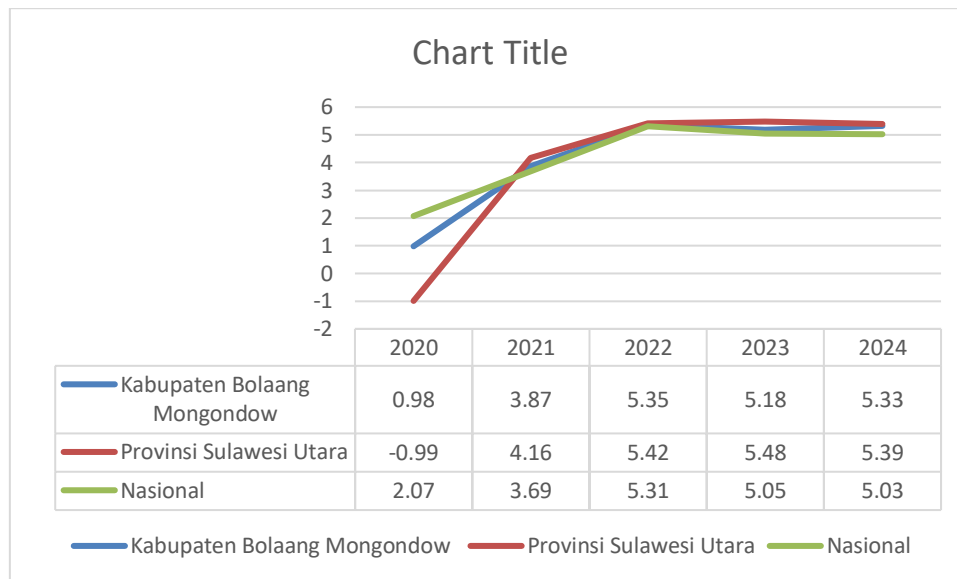
Gambar 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Bolmong 2025

Perbandingan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional bisa kita lihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Bolmong Dalam Angka 2025

Jika dilihat tabel diatas, kondisi pertumbuhan ekonomi kabupaten Bolaang mongondow menunjukkan trend meningkat dibanding tahun 2023, meski demikian upaya peningkatan investasi serta upaya pemulihan perekonomian melalui sektor usaha lainnya akan terus dilakukan sehingga diharapkan pada tahun 2025 kondisi ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow akan tumbuh optimis lebih baik dari tahun sebelumnya.

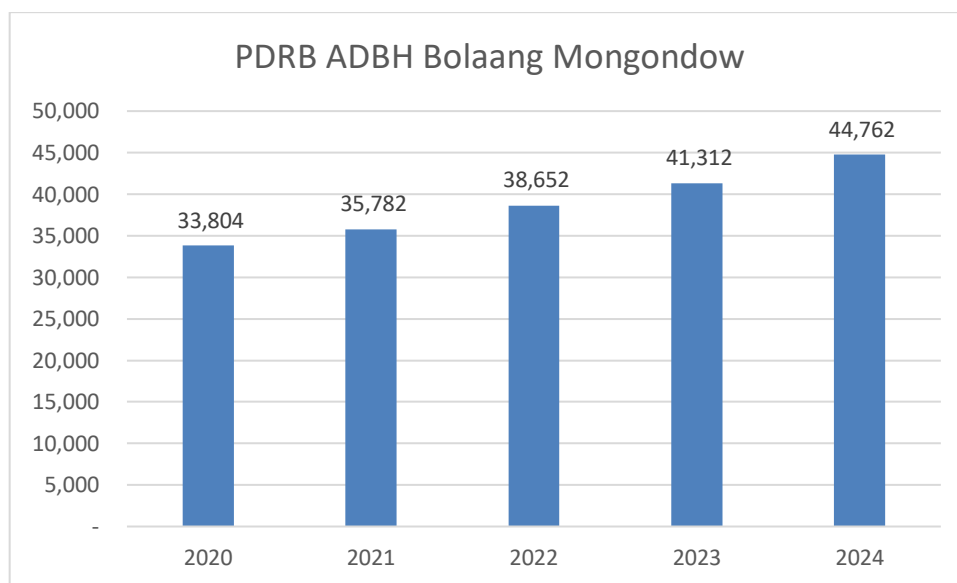
3.1.3. PDRB perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Salah satu kajian dan literatur yang ditempuh yakni menggunakan pendekatan variabel PDRB Perkapita. PDRB perkapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita) adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dengan kata lain,

PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata per orang di suatu daerah.

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Meski demikian pertumbuhan PDRB perkapita relatif lebih lambat yaitu hanya berkisar 3-4 persen.

Gambar 3.5. PDRB Perkapitan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Utara 2025

3.1.4. Inflasi.

Perkembangan inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow masih mengacu pada inflasi Kota Kotamobagu yang merupakan daerah terdekat yang secara otomatis dapat mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Kotamobagu sebesar 1,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,49. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,93 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,92 persen; kelompok

kesehatan sebesar 2,25 persen; kelompok transportasi sebesar 1,95 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,76 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,76 persen. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Kota Kotamobagu bulan Maret 2025 sebesar 2,98 persen dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Kota Kotamobagu bulan Maret 2025 sebesar 1,64 persen

Pada April 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Kota Kotamobagu sebesar 2,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,39.

Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Kota Kotamobagu bulan April 2025 sebesar 0,81 persen dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Kota Kotamobagu bulan April 2025 sebesar 2,47 persen.

3.1.5. Ketenagakerjaan

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan mempersiapkan usaha tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow berusia di atas 15 tahun pada tahun 2024 tercatat 197.353 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 134.62 jiwa penduduk termasuk dalam angkatan kerja dan sisanya sebanyak 62.701 jiwa termasuk kategori bukan angkatan kerja. Total penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, pada penduduk dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 91,90 persen memiliki kegiatan utama bekerja. Persentase bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir ini merupakan yang terkecil. Sebaliknya, persentase yang bekerja terhadap total penduduk angkatan kerja pada jenjang pendidikan terakhir kurang dari Sekolah Dasar (SD) memiliki persentase terbesar yaitu 97,55 persen.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 terus mengalami penurunan sebesar 4,48 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,61 persen. Meskipun jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja meningkat hingga mencapai 197.353 jiwa dan diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja sebesar 134.652 jiwa akan tetapi persentase Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja	118.506	194.731	197.353
Jumlah penduduk angkatan kerja	112.630	121.669	134.652
Persentase penduduk yang bekerja	95,04	95,39	95,52
Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	5.876	5.874	6.039
Persentase pengangguran terbuka	5,21	4,61	4,48

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2025 (BPS)

3.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Terdapat 5 (lima) indikator kemiskinan yang menjadi perhatian dalam melihat angka kemiskinan. Hal tersebut yakni Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan.

Jika dilihat dari angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan trend fluktuatif. Terjadi penurunan angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 7,04 persen atau berkurang hingga mencapai 0,54 poin dibanding tahun 2021 yang mencapai 7,58 persen. Kemudian perlahan Kembali bergerak naik pada tahun 2023 mencapai 7,37 atau naik 0,33 poin. Hal ini dipengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 17,96 ribu jiwa di tahun 2022 dan naik

menajdi 19,02 ribu jiwa di tahun 2023. Sementara tahun 2024 angka ini terus naik menjadi 7,74 dengan angka garis kemiskinan meningkat menjadi 415.628 Rb/kapita/bulan dibanding dengan tahun 2022 sebesar 355.639 Rb/kapita/bulan dan tahun 2023 sebesar 394.032 Rb/kapita/bulan. Indikator kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	19.08	17.96	19.02	20,19
Persentase Penduduk Miskin (P0)	7.58	7.04	7.37	7,74
Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	1.14	1.24	0.55	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.27	0.31	0.11	0,15
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	343.302	355.639	394.032	415.628

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

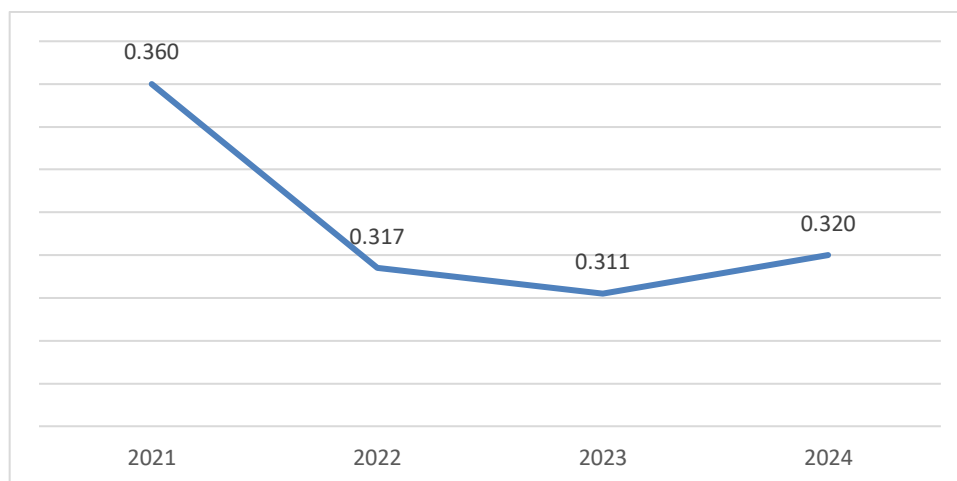
3.1.7. Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio)

Kabupaten Bolaang Mongondow masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di *University College London*, *Gini Ratio* menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan tersebut. *Gini Ratio* dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat. *Gini ratio* Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi

meski demikian belum adanya kesenjangan social ditingkatan Masyarakat. *Gini ratio* Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi meski demikian belum adanya kesenjangan social ditingkatan Masyarakat. Pada Tahun 2021 *Gini ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 0.360 dan pada tahun 2022, turun hingga mencapai 0.317 dan terus menurun pada angka 0.311 di tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dan mencapai angka 0,320. Hal ini disebabkan beberapa factor diantaranya adalah presentase jumlah penduduk miskin yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jumlah pengangguran terbuka usia kerja yang mengalami peningkatan. Sementara itu *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebesar 0.365 dan mengalami kenaikan 0,370 dan Kembali turun pada angka 0,360 pada Tahun 2024. Ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan di distribusikan secara merata diantara populasi. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak kaya.

Gambar 3.6. Rasio Gini Kabupaten Bolaang Mongondow 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2025

3.1.8. Indeks Modal Manusia

Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia selama kurang lebih 30 tahun

terakhir dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi capaian dan dampak pembangunan, pengukuran Indeks Pembangunan Manusia masih terbatas pada komponen kuantitas yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta kehidupan layak (pengeluaran per kapita), sehingga dirasa belum mampu mendorong investasi pada unsur sumber daya manusia. Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia.

Badan Pusat Statistik (BPS) hingga saat ini belum menghitung IMM. BPS hanya menghitung nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perbedaan antara IPM dan IMM adalah Indeks Modal Manusia (IMM) mampu mengukur Learning Experience sehingga dapat melihat dari segi kualitas pendidikan di suatu wilayah. IMM dapat dijadikan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi pembangunan manusia sehingga diharapkan mampu meningkatkan investasi yang lebih banyak pada modal manusia untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Indeks Modal Manusia merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh Bank Dunia, yang terdiri dari penilaian capaian aspek kesehatan (prevalensi balita tidak stunting, peluang bertahan hidup balita dan peluang bertahan hidup usia produktif) dan pendidikan (harapan lama sekolah dan harmonized test scores). Pada tahun 2020, nilai Indeks Modal Manusia Indonesia adalah sebesar 0,54 yang menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan hanya akan mencapai 54 persen potensi produktivitas maksimumnya saat ia berusia 18 tahun jika mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang ada saat ini secara penuh. Agar dapat dilakukan pemantauan secara rutin mempertimbangkan ketersediaan dan keterwakilan data, telah dilakukan penyesuaian metodologi perhitungan Indeks Modal

Manusia. Pada komponen pendidikan (harmonized test scores), Bank Dunia menggunakan skor Programme for International Student Assessment dari Organization for Economic Cooperation and Development yang memiliki beberapa keterbatasan antara lain tidak dilakukan secara tahunan dan tidak dapat diturunkan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dilakukan konvergensi skor Programme for International Student Assessment dengan rata-rata nilai Asesmen Nasional. Berdasarkan hasil penyesuaian metodologi tersebut, didapatkan capaian Indeks Modal Manusia Indonesia sebesar 0,53 pada tahun 2023.

Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai nilai 0,56 melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya peningkatan akses kesehatan untuk semua dilakukan melalui (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Dalam hal akses dan kualitas pendidikan, akan ditingkatkan melalui (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun mencakup perluasan 1 tahun pra-sekolah (perluasan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi, melalui peningkatan efektivitas bantuan pendidikan, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari daerah afirmasi, dan berprestasi; (3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

Pemenuhan layanan atau sarana kesehatan itu termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah. Selama satu dekade terakhir, kemajuan ini digerakkan terutama oleh penurunan angka stunting, karena tingkat gizi yang cukup sangatlah penting bagi anak-anak untuk dapat membangun modal manusianya. Di sektor pendidikan, akses kepada pendidikan telah mengalami peningkatan. Namun pencapaian siswa, yang merupakan suatu cara untuk mengukur kualitas sekolah, justru mengalami penurunan. Kondisi ini menandakan pentingnya untuk memperbaiki proses pembelajaran siswa.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah di era ini menghadapi Tantangan berat dan kompleks. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas dan *clear* memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan arahan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga sudah menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah contohnya dengan penggunaan aplikasi SIPD dalam proses Penganggaran, penggunaan aplikasi SISMIOP dalam pengelolaan Pajak Daerah, dan aplikasi SIRUP dalam pengelolaan Pengadaan Barang Barang dan Jasa. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depannya.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan

permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program Dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Penyusunan anggaran harus memperhatikan antara lain sebagai berikut :

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;

2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal; dan
3. Program dan kegiatan harus disusun dan mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang di hadapi.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongodow. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Pembuatan data base dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi;
- d. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
- e. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN APBD		APBD	REALISASI SAMPAI TRIWULAN I TA	PROYEKSI / TARGET P-RKPD
		2023	2024	2025	2025	2025
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.847.019.829,91	64.931.917.295,16	73.484.912.239,00	15.627.105.146,75	73.484.912.239
4.1.01	Pajak Daerah	48.618.898.979,00	41.777.573.317,00	49.610.937.239,00	11.094.345.534,00	49.610.937.239
4.1.02	Retribusi Daerah	12.504.563.525,00	14.846.047.915,00	18.473.975.000,00	3.295.141.683,00	18.473.975.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.882.571.278,10	3.878.205.042,00	2.800.000.000,00	0	2.800.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.840.986.047,81	4.430.091.021,16	2.600.000.000,00	1.237.617.929,75	2.600.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.011.692,757.515	986.867.418.179	1.094.388.305.188	216.501.157.386	1.055.069.211.188
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	968.023.534.518	944.792.802.297	1.059.598.768.000	216.501.157.386	1.020.279.674.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.669.222.997	42.074.615.882	34.789.537.188	0	34.789.537.188
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.729.465.898	8.204.982.092	9.658.800.000	0	9.658.800.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	342.325.200	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.387.140.698	8.204.982.092	9.658.800.000	0	9.658.800.000
	Jumlah Pendapatan	1.090.269.243.242,91	1.060.004.317.566,16	1.177.532.017.427,00	232.128.262.532,75	1.138.212.923.427

Sumber : BKD Kab Bolmong, Bappeda Kab. Bolmong Diolah 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolaang Mongondow dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Pada APBD Murni Tahun 2025 Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow dianggarkan sebesar Rp. 1.177.532.017.427 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.138.212.923.427 turun sebesar Rp. 39.319.094.000. Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 yang diproyeksikan di atas berasal dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.094.388.305.188. pada APBD Murni Tahun 2025 menjadi Rp. 1.055.069.211.188 pada Perubahan RKPD Tahun 2025;

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab II Poin C adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

A. Hasil Pajak Daerah

Pada APBD Tahun 2025 hasil pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 49.610.937.239, dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 49.610.937.239, Adapun pada perubahan APBD tahun Anggaran 2025 target pendapatan pajak daerah masih tetap pada target sebelumnya.

B. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi daerah pada APBD Tahun 2025 yaitu Rp. 18.473.975.000, dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 retribusi daerah masih tetap tidak mengalami perubahan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp 2.800.000.000, dan pada perubahan RKPD TA 2025 target masih mengacu pada target APBD Murni 2025.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000.000, pada Perubahan RKPD TA 2025 Dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000.000.

2. Sumber penerimaan kedua adalah Pendapatan Transfer yaitu pendapatan yang berasal dari pusat dan antar daerah yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan Nasional dan Daerah. Jumlah Pagunya Rp 1.094.388.305.188 pada APBD Murni Tahun 2025 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.055.069.211.188.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Pendapatan Transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena Pendapatan Transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.059.598.768.000, pada RKPD perubahan TA 2025 turun menjadi Rp. 1.020.279.674.000, terjadi pengurangan sebesar Rp. 39.319.094.000. Pengurangan yang terjadi dikarenakan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian alokasi Transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota TA. 2025 dalam rangka efisiensi Belaja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025, rincian dari DAU yang pada APBD TA 2025 berjumlah Rp. 605.687.120.000, pada Perubahan RKPD TA 2025 menjadi Rp. 590.678.173.000, berkurang sebesar Rp. 15.008.947.000, serta pada rincian DAK Fisik Bidang Jalan pada APBD TA 2025 sebesar Rp. 24.812.659.000, pada Perubahan RKPD TA 2025 berkurang sebesar Rp. 24.812.659.000.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana

yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pada APBD TA 2025 Pendapatan bagi hasil dianggarkan sebesar Rp. 34.789.537.188 dan pada Perubahan RKPD TA 2025 masih tetap dianggarkan sebesar Rp. 34.789.537.188 sambil menunggu Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Tentang Penetapan Alokasi sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan dan pajak Rokok tahun Anggaran 2025 untuk disesuaikan kembali.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sumber penerimaan ketiga yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Total Rp. 9.658.800.000 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Tidak ada perubahan.

- a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Tahun 2025 tidak memiliki pendapatan hibah

- b. Lain-Lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 9.658.800.000 pada RKPD Perubahan tidak mengalami perubahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.

Proyeksi Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun 2025

URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI / TARGET P-RKPD 2025	KETERANGAN
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.484.912.239,00	73.484.912.239	Tetap
Pajak Daerah	49.610.937.239,00	49.610.937.239	Tetap
Retribusi Daerah	18.473.975.000,00	18.473.975.000	Tetap
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.000.000,00	2.800.000.000	Tetap
Lain-lain PAD yang Sah	2.600.000.000,00	2.600.000.000	Tetap
PENDAPATAN TRANSFER	1.094.388.305.188	1.055.069.211.188	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.059.598.768.000	1.020.279.674.000	Adanya KMK RI No. 453 Than 2024 Tentang Perubahan Rician Alokasi DAK Non Fisik dan KMK No. 29 Thn 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dalam rangka efisiensi belanja Tahun 2025
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.789.537.188	34.789.537.188	Tetap
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.658.800.000	9.658.800.000	Tetap
Pendapatan Hibah	0	0	Tetap
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.658.800.000	9.658.800.000	Tetap
Jumlah Pendapatan	1.177.532.017.427,00	1.138.212.923.427	Berubah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan secara administratif. Realisasi dan proyeksi belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Bolaang Mongondow

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN APBD		APBD 2025	REALISASI SAMPAI TRIWULAN I TA 2025	PROYEKSI / TARGET P-RKPD 2025
		2023	2024			
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	709.078.331.784	789.445.131.071,75	870.722.797.448,78	132.950.817.689	830.347.895.819,20
5.1.01	Belanja Pegawai	409.574.045.733	467.491.412.190	559.128.603.503,90	112.159.333.454	561.193.502.823,90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.338.916.141	249.881.172.368,75	293.205.727.474,88	20.791.484.235	253.317.989.045,30
5.1.04	Belanja Subsidi	211.500.000,00	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	25.058.344.460	72.062.018.763	17.878.127.500	0	15.618.357.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	895.525.450	10.527.750	510.338.970	0	218.046.450
5.2	BELANJA MODAL	165.619.436.669	84.316.043.086	104.368.830.828,22	272.268.016	107.424.638.457,80
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	25.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.255.703.219	15.409.856.633	31.435.657.366,22	272.268.016	32.652.417.204,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.553.872.247	36.065.291.398	38.635.435.190,00	0	49.113.508.577,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.822.906.987	29.905.538.055	33.253.757.522,00	0	24.808.229.676,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.771.954.216	2.738.332.000	825.283.000	0	825.283.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000	197.025.000	218.697.750	0	0

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN APBD		APBD 2025	REALISASI SAMPAI TRIWULAN I TA 2025	PROYEKSI / TARGET P-RKPD 2025
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.293.061.063	1.501.050.900	5.000.000.000	0	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.293.016.063	1.501.050.900	5.000.000.000	0	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	215.630.787.000	231.084.028.347,31	236.502.334.924,00	24.318.056.770	236.502.334.924
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.155.999.000	5.790.020.356,31	6.808.491.224,00	1.984.194.090	6.808.491.224
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	210.474.788.000	225.294.007.991,00	229.693.843.700,00	22.333.862.680	229.693.843.700
	Jumlah Belanja	1.099.621.571.516	1.106.346.253.405,06	1.216.593.963.201	157.541.142.475	1.177.274.869.201
	Total Surplus/(Defisit)	(9.352.328.273.09)	-46.341.935.838,90	-39.061.945.774	74.554.112.102,75	-39.061.945.774

Sumber : BKD Kab Bolmong, Bappeda Kab. Bolmong Diolah 2025

3.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja ini pada APBD tahun 2025 dianggarkan Rp. 559.128.603.504,00 dan pada Perubahan RKPD dianggarkan lebih tinggi sebesar Rp. 561.193.502.823,90.
2. Belanja Barang Jasa adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja ini pada APBD tahun 2025 dianggarkan Rp. 293.205.727.474,88 dan pada Perubahan RKPD turun menjadi Rp. 253.317.989.045,30
3. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Belanja ini pada APBD tahun 2025 dan Perubahan RKPD tidak dianggarkan.
4. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja ini pada APBD tahun 2025 tidak dianggarkan.
5. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal, dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja ini pada APBD tahun 2025 dianggarkan Rp. 17.878.127.500,00 dan pada Perubahan RKPD turun menjadi Rp. 15.618.357.500,00.

6. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Belanja bantuan sosial pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 510.338.970,00 dan pada Perubahan RKPD tidak mengalami penurunan menjadi Rp. 218.046.450,00

Total Belanja Operasi pada APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 870.722.797.448,78,00 dan pada RKPD perubahan berkurang menjadi Rp. 830.347.895.819,20.

3.2.2.2. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal pada APBD Murni Tahun 2025 berjumlah Rp. 104.368.830.828,22 dan pada Perubahan RKPD TA 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 107.424.638.457,80. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis berikut :

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai .

pada APBD Murni Tahun 2025 tidak dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan Rp. 25.200.000.

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 31.435.657.366,22 dan pada Perubahan RKPD bertambah menjadi Rp. 32.652.417.204,80
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Total Belanja Gedung dan Bangunan pada APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 38.635.435.190,- dan pada RKPD perubahan bertambah menjadi Rp. 49.113.508.577,-
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Total Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 33.253.757.522,- dan pada Perubahan RKPD 2025 turun menjadi Rp. 24.808.229.676.
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 825.283.000, dan pada Perubahan RKPD TA 2025 tetap tidak mengalami perubahan.
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Total Belanja Aset Tetap Lainnya pada APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 218.697.750 dan pada Perubahan RKPD tidak di anggarkan lagi.

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD Murni TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Perubahan RKPD turun menjadi Rp. 3.000.000.000.

3.2.2.4. Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Total Belanja Transfer pada APBD murni TA 2025 Rp. 236.502.334.924,- dan perubahan nilainya masih tetap.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7.

Proyeksi Target Belanja Perubahan RKPD Tahun 2025

URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI / TARGET P-RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
BELANJA			
BELANJA OPERASI	870.722.797.448,78	830.347.895.819,20	Berubah
Belanja Pegawai	559.128.603.503,90	561.193.502.823,90	Adanya penambahan CPNS dan P3k Tahun 2025 (CPNS 108 Orang P3k 599 Orang) Sesuai Dengan Permenpan Rb Nomor 6 Tahun 2024)
Belanja Barang dan Jasa	293.205.727.474,88	253.317.989.045,30	Adanya Efisiensi Belanja (KMK No. 29 Thn 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dalam rangka efisiensi belanja Tahun 2025)
Belanja Subsidi	0	0	
Belanja Hibah	17.878.127.500	15.618.357.500	Berubah karena adanya Efisiensi
Belanja Bantuan Sosial	510.338.970	218.046.450	Berubah karena adanya Efisiensi
BELANJA MODAL	104.368.830.828,22	107.424.638.457,80	

URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI / TARGET P-RKPD TAHUN 2025	KETERANGAN
Belanja Modal Tanah		25.200.000,00	Berubah untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Pembangunan fasilitas Kesehatan Desa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.435.657.366,22	32.652.417.204,80	Berubah untuk pengadaan peningkatan disiplin ASN dan peningkatan tata Kelola Pendidikan di Tingkat sekolah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.635.435.190,00	49.113.508.577,00	Belanja Gedung Bangunan untuk Puskesmas dan Pustu
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.253.757.522,00	24.808.229.676,00	Adanya Efisiensi Belanja (KMK No. 29 Thn 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dalam rangka efisiensi belanja Tahun 2025)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	825.283.000	825.283.000,00	Tetap
Belanja Modal Aset Lainnya	218.697.750	0	Berubah karena adanya Efisiensi
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	3.000.000.000	Berubah karena adanya Efisiensi
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	3.000.000.000	
BELANJA TRANSFER	236.502.334.924,00	236.502.334.924	Tetap
Belanja Bagi Hasil	6.808.491.224,00	6.808.491.224	Tetap
Belanja Bantuan Keuangan	229.693.843.700,00	229.693.843.700	Tetap
Jumlah Belanja	1.216.593.963.201	1.177.274.869.201	Berubah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan.

Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berikut jenis jenis pembiayaan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada APBD Tahun 2025 defisit sebesar Rp. 39.061.945.774 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 masih tetap.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang. Pada APBD tahun 2025 dan pada perubahan RKPD TA 2025 tidak ada pengeluaran pembiayaan.

Gambaran kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 serta realisasi dan proyeksi pada Perubahan APBD selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Bolaang Mongondow

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN APBD		APBD 2025	REALISASI SAMPAI TRIWULAN I TA 2025	PROYEKSI / TARGET P-RKPD 2025
		2023	2024			
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.933.552.912	83.580.667.558,69	39.061.945.774	0	37.238.731.719.79
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.933.552.912	83.580.667.558,69	39.061.945.774	0	37.238.731.719.79
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	92.933.552.912	83.580.667.558,69	39.061.945.774	0	37.238.731.719.79
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	92.933.552.912	83.580.667.558,69	39.061.945.774	0	37.238.731.719.79
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0

Sumber : BKD Kab Bolmong, Bappeda Kab. Bolmong Diolah 2025

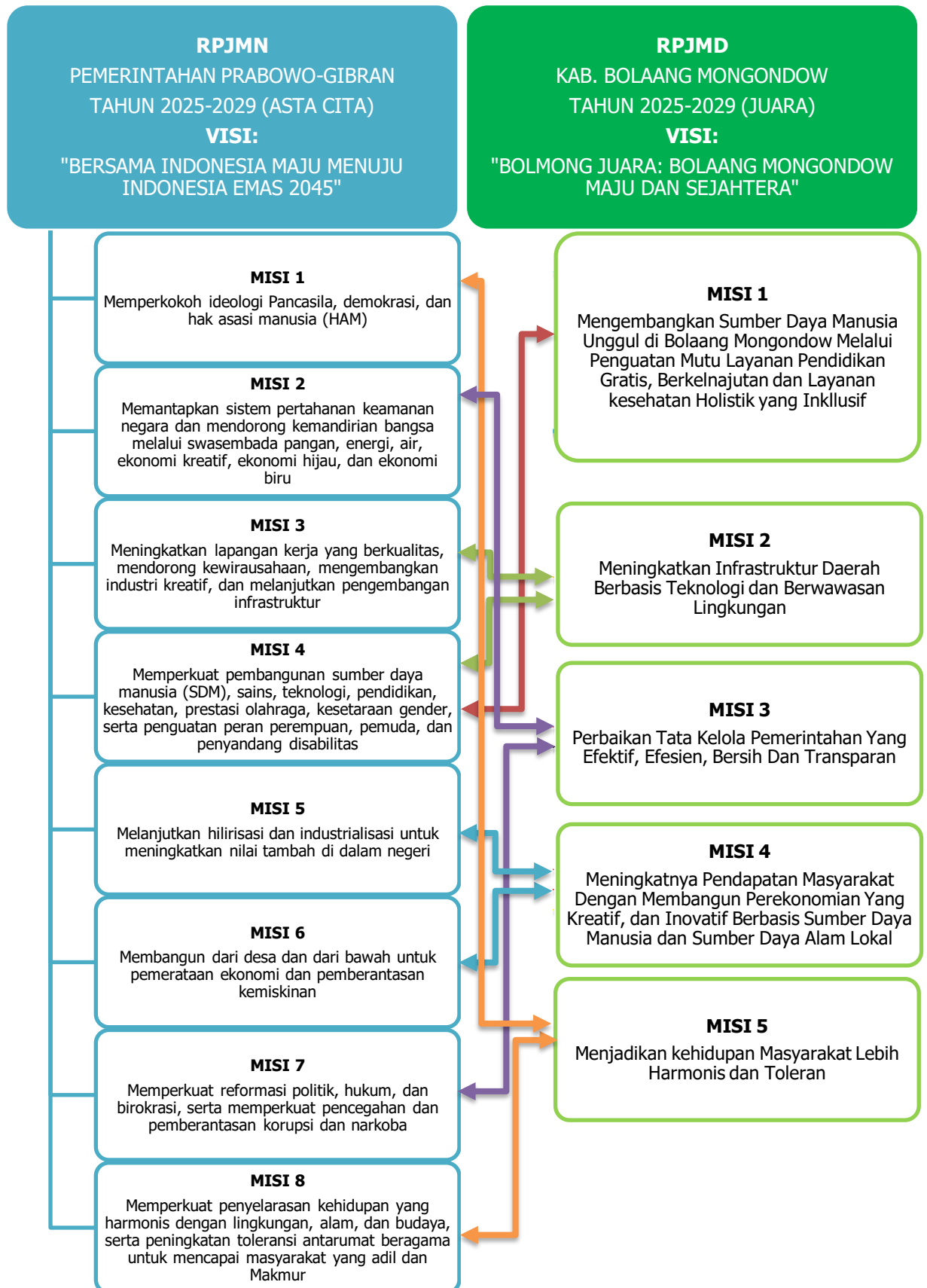
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD sesuai Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 maka ketentuan dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Sehingga arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program **Asta Cita** sudah harus diakomodir ke dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Gambar 4.1. Keselarasan Asta Cita dan Misi Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029



Jika melihat gambar diatas, maka terdapat keselarasan dalam misi baik di Tingkat nasional maupun daerah sehingga diharapkan dalam pelaksanaan dokumen perubahan RKPD seluruh misi dapat dilaksanakan.

4.1.1. Visi dan Misi.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow terpilih yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 berdasarkan kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini. Visi utamanya adalah **BOLMONG JUARA** yang merupakan akronim dari **BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA**. Dibalik kata “BOLMONG JUARA” tersimpan semua niatan dan semangat agar siapa saja yang sering mengucapkannya dan meneriakkannya, maka akan tertanam dalam alam bawah sadar sehingga menjadi energi baru sebagai daya dorong untuk menjadi “juara” sebagai ruh dan etos kerja. Visi “BOLMONG JUARA” adalah membangun Kabupaten Bolaang Mongondow yang Maju dan Sejahtera, dengan tiga pilar pembangunan yaitu inovasi, kolaborasi dan desentralisasi.

Visi Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera mengandung makna sebagai berikut:

Maju = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang berdaya saing tinggi, unggul, modern, tangguh, inovatif, kreatif, adaptif dan berkeadilan, di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selain itu, membangun Masyarakat Bolaang Mongondow yang Maju adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi bidang ”kesehatan, bidang pendidikan dan sarana prasarana pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

Sejahtera = menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow yang Sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui

peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan dan papan, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merumuskan lima misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif dan gratis

2. Misi Kedua

Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan.

3. Misi Ketiga

Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efesien, Bersih dan Transparan.

4. Misi Keempat

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Membangun Perekonomian yang Kreatif, Inovatif Berbasis Sumber Daya Manusia

dan Sumber Daya Alam Lokal.

5. Misi Kelima

Menjadikan Kehidupan Masyarakat lebih Harmonis dan Toleran

Perwujudan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

4.1.2. Tujuan

Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan Tahun 2025-2029, maka terdapat 5 tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, berdimensi kewilayahan serta ramah lingkungan;
3. Terwujudnya pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
5. Terwujudnya stabilitas politik, pemerintahan, sosial, budaya, toleran serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

4.1.3. Sasaran.

Kelima tujuan tersebut, kemudian dirumuskan sepuluh sasaran pembangunan daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
4. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup,
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan
6. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
7. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan
8. Menurunnya angka kemiskinan
9. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif
10. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, toleran, terkendali, tertib dan maju

Visi dan Misi tersebut maka dapat dijabarkan Bersama Tujuan dan Sasaran pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029

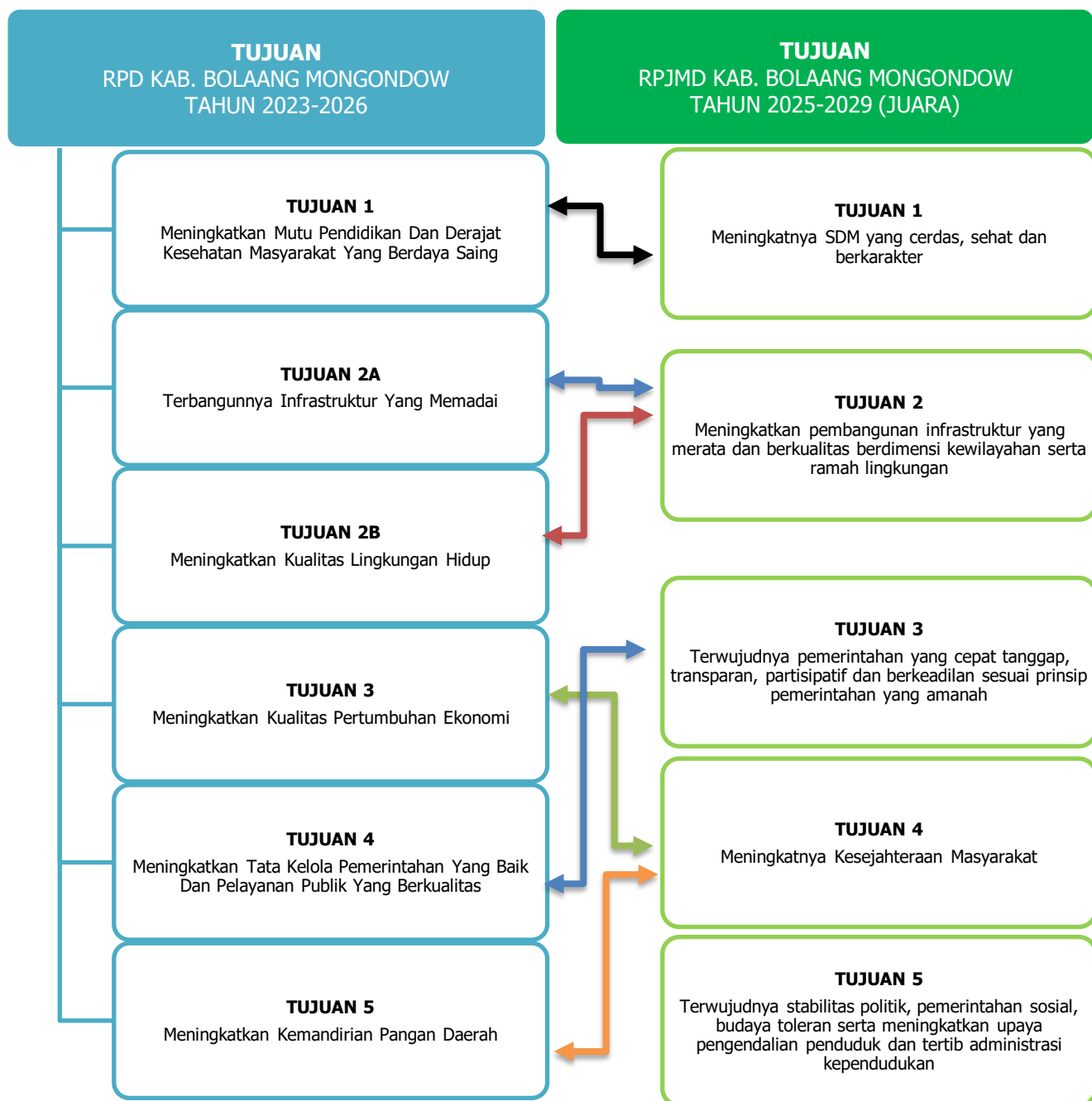
VISI			
BOLAANG MONGONDOW MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI 1			
Mengembangkan sumber daya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik yang inklusif			
NO	TUJUAN		SASARAN
I	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter	1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
MISI 2			
Meningkatkan Infrastruktur Daerah Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
NO	TUJUAN		SASARAN
II	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, berdimensi kewilayahan serta ramah lingkungan	3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
		4	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup

MISI 3			
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efesien, Bersih Dan Transparan			
NO	TUJUAN		SASARAN
III	Terwujudnya pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah	5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan
MISI 4			
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Dengan Membangun Perekonomian Yang Kreatif, Dan Inovatif Berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal			
NO	TUJUAN		SASARAN
IV	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	6	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
		7	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan
		8	Menurunnya angka kemiskinan
		9	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan inovatif
MISI 5			
Menjadikan Kehidupan Masyarakat Lebih Harmonis dan Toleran			
NO	TUJUAN		SASARAN
V	Terwujudnya stabilitas politik, pemerintahan, sosial, budaya, toleran serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	10	Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, toleran, terkendali, tertib dan maju

Dalam upaya memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 sesuai amanat Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka perlu diperhatikan indikator sasaran yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku saat ini sehingga bisa ditemukam kesesuaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan tahun 2025. Berikut gambar keselarasan antara tujuan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan tujuan RPD tahun 2023-2026.

Gambar 4.2. Keselarasan Tujuan Kepala Daerah Terpilih dan Tujuan RPD tahun 2023-2026



Jika melihat gambar diatas, menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran antara Rencana Pembangunan Daerah dan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sehingga terbentuk senengitas dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2025. Berikut tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta indikator Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2025-2029.

Tabel 4.2. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026

NO	TUJUAN / SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	ANGKA	68,16	68,5	68,75	70	70,25	70,25	
1.1	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	TAHUN	13,3	13,5	13,7	13,9	14	14	
1.2	MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	ANGKA	69,45	69,55	69,65	69,75	70	70	
1.3	MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN	PERSEN	7,58	7	6,75	6,25	5,75	5,75	
2	TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI	INDEKS INFRASTRUKTUR	ANGKA	65	66	67	68	70	70	
2.1	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	ANGKA	18	23,39	24,09	24,82	25,56	25,56	
2.2		PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	PERSEN	65	67	69	71	73	73	
2.3	MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	PERSEN	70,17	71,7	73,2	74,7	76,2	76,2	
3	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGKA	71,95	71,96	71,97	71,98	72	72	
3.1	MENINGKATNYA KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS AIR	ANGKA	44,55	50	55	60	60	60	
3.2	MENINGKATNYA KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS UDARA	ANGKA	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43	
3.3	MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS TUTUPAN LAHAN	ANGKA	74,90	75	75	75	75	75	
4	MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI	PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	4,5	4,9	5,1	5,58	6,15	6,15	
		GINI RATIO	ANGKA	0,34	0,335	0,33	0,315	0,31	0,31	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026		
4.1	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	10,1	10,1	10,3	10,3	10,35	10,35	
		KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	1	1,22	2	2,5	3	3	
4.2	MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PERSEN /TAHUN	10	10	10	10	10	10	
5	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	NILAI RATA RATA CAPAIAN OPINI BPK, NILAI SAKIP LPPD INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ANGKA	-	77,5	83,5	84,75	87,75	87,75	
5.1	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ZONA	KUNING	KUNING	KUNING	HIJAU	HIJAU	HIJAU	
5.2	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	OPINI BPK	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		NILAI SAKIP	PREDIKAT	B	B	BB	BB	BB	BB	
		LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ANGKA	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	
6	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH	INDEKS KETAHANAN PANGAN	ANGKA	84,89	84,94	84,99	85,04	85,15	85,15	
6.1	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN	RASIO PANGAN	ANGKA	1,02	1,08	1,14	1,14	1,2	1,2	

4.2. Tema Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Tema RKPD Tahun 2025.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, dilakukan perumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional provinsi serta dokumen RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2045 sebagai tindaklanjut dari amanat Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 159 dan pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan

pembangunan daerah memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan baik di Tingkat nasional provinsi maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2024 sehingga sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN 2025-2029, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selanjutnya akan diintegrasikan dengan visi misi presiden terpilih. Adapun tema RKP Tahun 2025 yakni **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Elaborasi dari tema ini terdapat pada “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi” menekankan pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. “Inklusif” Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua segmen masyarakat, termasuk yang rentan dan marginal, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan “Berkelanjutan” Tema ini juga menekankan pada pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang, sehingga tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang

Tema tersebut selanjutnya dituangkan kedalam 8 (delapan) Prioritas Pembangunan nasional yang yang selaras dengan RPJMN tahun 2025-2029 dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut 8 prioritas Pembangunan Nasional :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,

Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 **“Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** dilakukan melalui 8 Misi yang terdiri atas.

1. Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Membangun Perekonomian Daerah.
4. Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional.
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Energi dan Air Secara Merata dan Berkelanjutan.

6. Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Nyaman Dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Yang Berkearifan Lokal.
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
8. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan.

Arah kebijakan Pembangunan Sulawesi Utara tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025, yakni dengan tema **“Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan berkelanjutan melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan”** terdiri dari 8 Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
4. Peningkatan daya saing investasi daerah;
5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Pembangunan pertanian perkebunan perikanan dan pariwisata
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan RKPD tahun 2025 sesuai tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah **“Memaksimalkan Kontribusi Pertanian Industri Dan Pariwisata didukung sarana prasarana dan SDM yang memadai dan berkelanjutan”**. arah kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam upaya Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor industry, pariwisata serta sektor pertanian perikanan dan mewujudkan kemandirian pangan yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing daerah. Prioritas pembangunan pada tahun ini juga diharapkan mampu mendukung arah kebijakan pemerintah provinsi Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan berkelanjutan melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan.

4.2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Adapun rumusan permasalahan dan isu strategis yang di analisis dalam menentukan focus Pembangunan pada tahun 2025 yakni :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan
2. Belum optimalnya konektifitas antar Kawasan
3. Rendahnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah
4. Rendahnya produktivitas industry pengolahan daerah
5. Belum optimalnya infrastruktur daerah
6. Belum optimalnya tingkat kesejahteraan Masyarakat
7. Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan
8. Belum optimalnya produktivitas pangan daerah
9. Belum optimalnya pelayanan public
10. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan
11. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Dari permasalahan diatas dirumuskan isu isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pemenuhan kualitas infrastruktur yang merata sesuai dengan potensi daerah serta peningkatan konektifitas wilayah antar wilayah yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal
3. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas modern dan pelayanan yang prima
4. Meningkatkan lumbung pangan dan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri

Kebijakan prioritas pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 meliputi:

1. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas serta berwawasan lingkungan;
2. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Penguatan Koperasi, UMKM dan Industri pengolahan;
5. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja;
6. Optimalisasi dana desa untuk pengembangan perekonomian desa;
7. Peningkatan infrastruktur dasar;
8. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
10. Ketersediaan dan distribusi pangan;
11. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 4.3. Keselarasan Isu Strategis, prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2025

No	Isu strategis	Prioritas daerah	Sasaran daerah	Program pembangunan daerah
1	Pemenuhan kualitas infrastruktur yang merata sesuai dengan potensi daerah serta peningkatan konektifitas wilayah antar wilayah yang berwawasan lingkungan	Pemerataan pembangunan yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas air	Program percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas udara	
			Meningkatnya kualitas tutupan lahan	
		Peningkatan infrastruktur dasar	Meningkatnya infrastruktur transportasi	
			Meningkatnya layanan air minum layak	
2	Meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal	Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Program penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
		Optimalisasi dana desa untuk pengembangan perekonomian desa	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	
		Penguatan koperasi, umkm dan industri pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	
		Peningkatan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	
		Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan	
		Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Menurunnya angka kemiskinan	

3	Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas modern dan pelayanan yang prima	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
			Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia
			Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan semesta	
4	Meningkatkan lumbung pangan dan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri	Ketersediaan dan distribusi pangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Program peningkatan kemandirian pangan daerah

Sumber : Bappeda Bolmong 2025.

4.2.3. Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow serta Tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 ini mengacu pada RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, dimana visi yang tertuang di dalamnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2025.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 maka ketentuan dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Sehingga arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program **Asta Cita** sudah harus diakomodir ke dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Adapun penyeselarasan prioritas Pembangunan tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah 203-2026 serta Tujuan berdasarkan visi misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Keselarasan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, serta Tujuan RPD dan sasaran serta Prioritas Pembangunan Tahun 2025

NO	TUJUAN KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2025-2029	TUJUAN RPD 2023-2026	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH
1	TUJUAN 1 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, DAN BERKARAKTER	MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
				MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
				MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN	PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
						PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA
2	TUJUAN 2 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS BERDIMENSI KEWILAYAHAN SERTA RAMAH LINGKUNGAN	TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI	INDEKS INFRASTRUKTUR	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR
				MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	
					PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	
3	TUJUAN 2 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS BERDIMENSI KEWILAYAHAN SERTA RAMAH LINGKUNGAN	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS AIR	PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN
				MENINGKATNYA KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS UDARA	
				MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS TUTUPAN LAHAN	
	TUJUAN 4 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH	INDEKS KETAHANAN PANGAN	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN	RASIO PANGAN	KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA
4	TUJUAN 4 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI	PERTUMBUHAN EKONOMI	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PENGUATAN KOPERASI, UMKM DAN INDUSTRI PENGOLAHAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	TUJUAN KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2025-2029	TUJUAN RPD 2023-2026	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH
					KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRE SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DESA
			GINI RATIO	MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
5	TUJUAN 3 TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG CEPAT TANGGAP, TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN SESUAI PRINSIP PEMERINTAHAN YANG AMANAH	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	NILAI RATA RATA CAPAIAN OPINI BPK, NILAI SAKIP LPPD INDEKS PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH			OPINI BPK	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
				NILAI SAKIP		
				LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		

Sumber : Bappeda Bolmong 2025

4.2.4. Keselarasan Tema dan prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD 2025 - 2029. Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ini adalah **“Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan berkelanjutan melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan”** dengan penjabaran pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 yakni :

1. Pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
2. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
4. Peningkatan daya saing investasi daerah;
5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Pembangunan pertanian perkebunan perikanan dan pariwisata
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun penyelebaran Tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara didalam RKPD Tahun 2025 dengan prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
1	PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR
		PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN
2	PEMBANGUNAN PERTANIAN PERKEBUNAN PERIKANAN DAN PARIWISATA	PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA
		KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
3	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DESA

		PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
4	PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH	PENGUATAN KOPERASI, UMKM DAN INDUSTRI PENGOLAHAN
5	PENGUATAN KAPASITAS SDM SULAWESI UTARA	PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA
6	PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH	PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
7	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sumber : Bappeda Sulut 2024, Bappeda Bolmong 2024 (diolah)

4.2.5. Keselarasan Tema dan prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2024 sehingga sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN 2025-2029, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selanjutnya akan diintegrasikan dengan visi misi presiden terpilih. Adapun tema RKP Tahun 2025 yakni **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan

Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun penyelebaran Tema dan prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 pada tabel berikut :

Tabel 4.6. Keselarasan Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
1	PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGRO-MARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR
2	PRIORITAS NASIONAL 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR	PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

3	PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI	PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA
		KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
4	PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN	OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DESA
		PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
		PENGUATAN KOPERASI, UMKM DAN INDUSTRI PENGOLAHAN
5	PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU	PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA
		PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
6	PRIORITAS NASIONAL 4: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
7	PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN NARKOBA	
8	PRIORITAS NASIONAL 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas 2024, Bappeda Bolmong 2024.

4.2.6.Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang juga

dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada Periode ke tiga RPD 2023-2026.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Daerah tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Bolaang Mongondow terkait pemabngunan manusia, ketertiban dan ketenteraman pemertaan pendapatan dan kesempatan kerja.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator tujuan dan sasaran daerah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.7. Indikator kinerja Tujuan Tahun 2025

NO	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI Tahun 2024	TARGET (Tahun 2025)
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	ANGKA	71,14	72
2	INDEKS INFRASTRUKTUR	ANGKA	65	68
3	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGKA	74,21	76
4	PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	5,33	5,58
	GINI RATIO	ANGKA	0,320	0,315
5	NILAI RATA RATA CAPAIAN OPINI BPK, NILAI SAKIP LPPD INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ANGKA	65,66	84,75
6	INDEKS KETAHANAN PANGAN	ANGKA	84,02	85,04

Sumber : Bappeda Bolmong 2024

Tabel 4.8. Indikator kinerja Sasaran Tahun 2025

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET (Tahun 2025)
1	INDEKS PENDIDIKAN	TAHUN	13,3	13,9
2	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	ANGKA	70,31	71,20
3	ANGKA KEMISKINAN	PERSEN	7,74	7
4	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	ANGKA	18	24,82
5	PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	PERSEN	65	71
6	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	PERSEN	70,17	74,7
7	INDEKS KUALITAS AIR	ANGKA	55	58
8	INDEKS KUALITAS UDARA	ANGKA	95,43	95,47
9	INDEKS TUTUPAN LAHAN	ANGKA	61,04	61,04
10	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	10,1	10,3
11	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	1	2,5
12	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PERSEN /TAHUN	10	10
13	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ZONA	HIJAU	HIJAU

14	OPINI BPK	OPINI	WTP	WTP
15	NILAI SAKIP	PREDIKAT	B	BB
16	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ANGKA	3,5	3,8
17	RASIO PANGAN	ANGKA	1,10	1,14

Sumber : Bappeda Bolmong 2024

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKK Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKK Kepala PD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Baseline 2022	Target 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
DINAS PENDIDIKAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
Angka rata-rata lama sekolah	Angka	8,03	8,3	Dinas Pendidikan
Angka harapan lama sekolah	Angka	11,53	11,9	Dinas Pendidikan
Rata-Rata APM (Angka Partisipasi Murni) SD dan SMP	Angka	86,76	88,15	Dinas Pendidikan
Persentase Sekolah Yang Menyelenggarakan Pembelajaran Muatan Lokal	Persen	100	100	Dinas Pendidikan
Rasio Guru Terhadap Murid Pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Pertama	Angka	7,80	13,5	Dinas Pendidikan
Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persen	100	100	Dinas Pendidikan
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	100	Dinas Pendidikan
DINAS KESEHATAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,009	0,005	Dinas Kesehatan
Persentase Desa/Kelurahan UCI	Persen	65,35	80,2	Dinas Kesehatan
Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	-3,78	-0,42	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu melahirkan/100.000 Kelahiran Hidup	Angka	71,5	23,61	Dinas Kesehatan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Persentase FKTP Yang Tersertifikasi Akreditasi	Persen	66,67	100,00	Dinas Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	Persen	39,13	86,47	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas dan apotik yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	Persen	60	90	Dinas Kesehatan
Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,1	0,7	Dinas Kesehatan
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG				
Rasio Angka Kematian (NDR)	Angka	19	11	Rumah Sakit Umum Daerah
Jumlah Standar Akreditasi Rumah Sakit Yang terpenuhi	Standar	12,00	15	Rumah Sakit Umum Daerah
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	Persen	39,13	86,47	Rumah Sakit Umum Daerah
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
Persentase Kondisi Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik (%)	Persen	80	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	Persen	68,56	74,7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rata-rata Persentase Layanan Akses Sanitasi Rumah Tangga Pada Bidang Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase (%)	Persen	47,01	50,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Penyedia jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi (%)	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Persentase kesesuaian penataan ruang dengan RTRW Kabupaten	Persen	72,26	74,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Kelola	Unit	369	390	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Jaringan Instalasi Air Minum Terpasang dalam kondisi Baik	Persen	90	93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase layanan penyediaan sistem air limbah	Persen	30,02	36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase layanan Jaringan Drainase Kabupaten	Persen	64	65,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Panjang jalan dalam kondisi mantap	KM	320,91	371,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Cakupan Penyedia Jasa Konstruksi yang memiliki tenaga terampil	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dokumen Kebijakan Penyesuaian RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi dan Nasional	Perda	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
Persentase rumah tidak layak huni tertangani (%)	Persen	33,8	92,69	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Cakupan Permukiman kumuh	Persen	0,7	0,044	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Persen	0	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Prosentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	Persen	75,72	95,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Persentase Rumah tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	Persen	19,05	79,68	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Penyediaan PSU Hunian yang Terbangun	Persen	38,2	84,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah laporan pengembang yang bersertifikasi dan teregistrasi	Laporan	1	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terlaksana	Persen	0	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Persentase Kasus pelanggaran PERDA / PERKADA yang di Tindaklanjuti	Persen	40	80	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani	Persen	45	80	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani	Persen	70	80	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang tertangani	Persen	60	80	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Pelaksanaan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persen	60	80	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	75	85	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Persentase Desa dan Kelurahan yang terlatih dalam menghadapi ancaman bencana	Persen	60	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase jumlah Korban Bencana yang ditangani	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Infrastruktur Pasca Bencana yang di rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen	30	60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase bencana yang tertanggulangi	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DINAS SOSIAL				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Persentase Penurunan PMKS	Persen	5,4	2	DINAS SOSIAL
Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif	Persen	84	96	DINAS SOSIAL
Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial	Persen	10	10	DINAS SOSIAL
Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani	Persen	100	100	DINAS SOSIAL
Persentase Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan bagi PMKS	Persen	5	5	DINAS SOSIAL
Jumlah PSKS (Potensi Sumber Kejejaheraan Sosial yang Aktif	PSKS	6	14	DINAS SOSIAL
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	95	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				
Angka partisipasi angkatan kerja (%)	Persen	65,4	75	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Persentase Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,74	4.4	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan	Persen	70	80	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kerja	PERSEN	100	100	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja Yang Direncanakan	PERSEN	50	80	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	PERSEN	24	30	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Persentase Pembinaan Hubungan Industrial Yang dilakukan	PERSEN	55	80	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	PERSEN	91,92	100	DINAS SOSIAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Skala)	Angka	0,0039	0,0017	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	Angka	88,3	88,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Status Penilaian Kabupaten Layak Anak (Angka)	Angka	40,1	70,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Capaian indeks pemberdayaan gender	persen	77,77	82	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Persentase perempuan yang memperoleh perlindungan	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Persentase Keluarga yang mendapatkan Peningkatan Kualitas	Persen	80	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Data Base gender dan Anak	Dokumen	0	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Persentase lembaga yang memberikan layanan Pemenuhan hak anak	Organisasi	72	82	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Persentase Perlindungan Khusus Anak	Persen	0,00147	0,00630	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	PERSEN	95	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
DINAS KETAHANAN PANGAN				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN				
Rasio Pangan Daerah (skala)	Skala	0,96	1,14	Dinas Ketahanan Pangan
Persentase Lumbung Pangan Yang memadai berdasarkan Jumlah kecamatan	Persen	26,6	66,6	Dinas Ketahanan Pangan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Skor PPH Konsumsi	Skala	88,6	91	Dinas Ketahanan Pangan
Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Persen	0,44	1	Dinas Ketahanan Pangan
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang lolos uji keamanannya di laboratorium	Persen	1	1	Dinas Ketahanan Pangan
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	95	100	Dinas Ketahanan Pangan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Indeks Kualitas Air	Angka	44.55	55	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kualitas Udara	Angka	95.43	95.43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	74.90	75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Adanya PERDA RPPLH dan Dokumen KLHS	Perda	1	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Cakupan Pengendalian terhadap lokasi Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Lokasi	0	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Cakupan Ruang terbuka hijau Yang di kelola	Persen	1	3,1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Cakupan Pengendalian B3 dan LB3	Persen	8,6	86,2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Cakupan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persen	8,6	86,2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Pengakuan terhadap Keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH	Persen	0	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Persentase kader Peduli Lingkungan Yang Ditingkatkan Wawasannya	Persen	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Akumulasi Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Penghargaan LH	Orang	5	14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	10	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Penanganan Sampah	Persen	2,65	99	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	95	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 17 Thn	Angka	91,39	99	DUKCAPIL
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak 0 – 16 Thn	Angka	45	60	DUKCAPIL
Cakupan penduduk berKTP per satuan penduduk	Persen	96	99	DUKCAPIL
Cakupan pasangan berakte nikah	Persen	52,74	90	DUKCAPIL
Perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Angka	8	2	DUKCAPIL
Indeks kepuasan masyarakat pelayanan dukcapil	Angka	0	85	DUKCAPIL
Presentase Capaian Pendaftaran Penduduk	Persen	88	95	DUKCAPIL
Persentase Capaian Pencatatan Sipil		72	90	DUKCAPIL
jumlah dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	8	3	DUKCAPIL
Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Adminduk	Dokumen	2	3	DUKCAPIL
Presentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	DUKCAPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
Indeks Desa Membangun	Angka	17	22	
Persentase jumlah Desa yang kewenangannya tertata	persen	50	80	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Bumdes	Jumlah	186	189	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
Persentase pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	0	25	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
Presentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rasio)	Angka	2,43	2,42	DPPKB
Peserta KB aktif (%)	Persen	77,25	77,34	DPPKB
Cakupan Data Keluarga berencana (KB)	Persen	80	85 %	DPPKB
Persentase Kesertaaan Keluarga dalam ber KB	Persen	77,25	77,34	DPPKB
Cakupan Kualitas Keluarga	Persen	75	85	DPPKB
Presentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	DPPKB
DINAS PERHUBUNGAN				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN				
Rasio Angka kecelakaan Lalulintas terhadap jumlah perlintasan kendaraan selama satu tahun (angka)	Angka	0,000642	0,000642	Dinas Perhubungan
Presentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	Dinas Perhubungan
Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan (Persen)	Persen	18,59	25,08	Dinas Perhubungan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE)	Angka	2,03	2,5	Dinas Komunikasi dan Informatika

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Indeks Keterbukaan Informasi	Angka	35	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase OPD yang menerapkan e-Government	Persen	71,43	93,88	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Capaian Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persen	88,89	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK				
Jumlah data Pembangunan Daerah yang tepat waktu	Persen	0	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN				
Persentase peningkatan Keamanan Sistem Persandian	Persen	0	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	Angka	15	23	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	2%	8 Kop	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase koperasi yang aktif dan berkualitas	Persen	40%	55%	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase Koperasi KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya Koperasi	Persen	25%	29%	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase Pelatihan Perkoperasian yang mengikuti Diklat	Persen	50%	80%	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase Peningkatan SDM UKM dan Kewirausahaan	Persen	20%	24%	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro yang di Berdayakan	Persen	15%	22%	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase Peningkatan Modal Usaha	Persen	0	90 %	Dinas Koperasi dan UKM

Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%	Dinas Koperasi dan UKM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				
Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	91,56	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	1023	1300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Investor Yang Mengurus Perijinan	Jumlah Investor	7	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha	Persen	0,56	0,8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase permasalahan pengaduan yang diselesaikan	Persen	95	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Aplikasi Pengelolaan Data Penanaman Modal yang dimanfaatkan	Persen	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Jumlah Cabang olahraga yang menyumbangkan medali (Emas, Perak, Perunggu) pada pekan olahraga tingkat provinsi (Cabor)	Angka	16	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang dikembangkan	Cabor	16	25	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Persen	100	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Jumlah Pemuda pelopor dan pemuda kader yang diberdayakan	orang	191	251	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
Peningkatan publikasi dan Gelaran Seni Budaya Dan Tradisi Lokal	Angka	2	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Cakupan Pengembangan Kebudayaan dan pelaku seni budaya	Persen	70	70	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Cakupan Kesenian yang Dikembangkan	Persen	70	70	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Cagar Budaya yang Terdata	Objek	26	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
Ratio Jumlah pengunjung perpustakaan (Skala)	Angka	0,15	0,79	
Persentase Perpustakaan Yang Dibina	persen	100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Persentase Pengelolaan Arsip secara terpadu (%)	Persen	10	14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Persentase jumlah arsip yang diolah	Persen	0	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
persentase jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	persen	0	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
DINAS PERIKANAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	Angka	103	106	Dinas Perikanan
Persentase Laju pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0,77	1,72	Dinas Perikanan
Angka Produksi Perikanan Budidaya	tom	165,5	800	Dinas Perikanan
Jumlah Kegiatan Ilegal Fishing	kali	0 Kali	2	Dinas Perikanan
Jumlah Jenis Produksi Olahan Hasil Perikanan	produk	1	5	Dinas Perikanan
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	Dinas Perikanan
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bolaang Mongondow	Angka	235.000	253.800	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD (%)	Persen	0,17	0,42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	70	70	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara	Persen	75	75	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	persen	95	95	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DINAS PERTANIAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
Angka Ketersediaan Pangan (%)	Persen	105.6	108,5	DINAS PERTANIAN
Jumlah Bibit Yang Bersertifikat	Benih/Bibit	4	7	DINAS PERTANIAN
Persentase jumlah kasus yang tertangani	Persen	100	100	DINAS PERTANIAN
Persentase wilayah yang terkendali dan tertanggulangi akibat bencana	Persen	100	100	DINAS PERTANIAN
Persentase Rata-rata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Tanaman Perkebunan (16 Komoditi)	Persen	-9,71	1,5	DINAS PERTANIAN
Rasio Jumlah Penyuluh Dengan Jumlah Desa / Kelurahan Yang mempunyai Lahan Pertanian/ Perkebunan	Angka	0,88	1,25	DINAS PERTANIAN
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	DINAS PERTANIAN
DINAS PERKEBUNAN				
Rata-rata Persentase Peningkatan produksi Tanaman Perkebunan (6 Komditi) %	Persen	-12,73	-2	Dinas Perkebunan
Jumlah Varietas benih/bibit yang bersertifikat	Bibit	6	6	Dinas Perkebunan
Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	Persen	-9,71	1,5	Dinas Perkebunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Rasio Jumlah Penyuluh Dengan Jumlah Desa / Kelurahan Yang mempunyai Lahan Pertanian/ Perkebunan	ANGKA	0,03	0,03	Dinas Perkebunan
Persentase wilayah yang terkandali dan tertanggulangi akibat bencana	Persen	0,29	0,64	Dinas Perkebunan
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	persen	75	87,5	Dinas Perkebunan
DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
Kontribusi Sektor perdagangan Besar dan Eceran terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	1.013,20	1.193,20	Dinas Perdagangan dan ESDM
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	654,66	774,66	Dinas Perdagangan dan ESDM
Persentase Sarana Perdagangan Yang Berfungsi (Pasar)	Persen	76,47	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
Koefisien Variasi Harga Bapok dan Barang Penting Secara Antar Waktu	Bapok	8	11	Dinas Perdagangan dan ESDM
Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha	4	10	Dinas Perdagangan dan ESDM
Persentase Capaian Tera Ulang	Persen	99,45	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
Persentase Pelaku Usaha Yang Menjual Khusus Produk Dalam Negeri	Persen	97,96	98	Dinas Perdagangan dan ESDM
Persentase Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang terdaftar dan memiliki ijin usaha	Persen	93,9	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
Persentase Pengelolaan Energi terbarukan berdasarkan potensi	Persen	10	50	Dinas Perdagangan dan ESDM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
Perda perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	0	0	Dinas Perdagangan dan ESDM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Persentase IKM yang memiliki izin usaha	Persen	17,42	38,46	Dinas Perdagangan dan ESDM
Persentase Industri Yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	0,46	10	Dinas Perdagangan dan ESDM
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	persen	95	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
Persentase Ketersediaan Kawasan transmigrasi	Persen	0	80	
Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi	Persen	0	80	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
Nilai Indeks Pelayanan Publik (Angka)	Angka	57,09	90	SEKRETARIAT DAERAH
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	58,6	73	SEKRETARIAT DAERAH
Predikat Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	SEKRETARIAT DAERAH
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Angka	3.419	3,8	SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi umum	Persen	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Capaian Tertib Administrasi umum	Persen	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Capaian Tertib Adminlstrasi umum	Persen	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Capaian Tertib Adminlstrasi umum	Persen	100	100	SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat DPRD				
Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	95	95	SEKRETARIAT DPRD
Persentase Capaian Propemperda yang ditetapkan	Persen	40	98	SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Dokumen	133	83	SEKRETARIAT DPRD
Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
PERENCANAAN				
Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	90	94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Inovasi Daerah	Angka	7,28	35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan	Persen	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan	Persen	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BADAN KEUANGAN DAERAH				
KEUANGAN				
Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	Nilai	WTP	WTP	BKD

Persentase perangkat daerah yang tidak ada temuan menyangkut pengelolaan keuangan oleh instansi pemeriksa	Persen	91.23 %	91.23	BKD
Persentase Nilai Aset yang tidak bermasalah	Persen	90	100	BKD
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	10	10	BKD
Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	95	95	BKD
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
KEPEGAWAIAN				
Indeks Sistem Merit	Angka	0,6	0,9	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	30,77	70	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Rasio Pengembangan Kompetensi	Angka	0,53	0,86	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	70	85	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH				
INSPEKTORAT				
Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	Angka	2	2,8	Inspektorat
Level Maturitas SPIP Terintegrasi (angka)	Angka	2,1	2,8	Inspektorat
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	Entitas	275	275	Inspektorat
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	10	10	Inspektorat
Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				

KECAMATAN POIGAR				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Poigar
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Poigar
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Poigar
KECAMATAN PASSI TIMUR				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Passi Timur
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Passi Timur
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Passi Timur
KECAMATAN DUMOGA				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Dumoga
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Dumoga
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Dumoga
KECAMATAN DUMOGA TIMUR				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	25	85	Kecamatan Dumoga Timur
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Dumoga Timur
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Dumoga Timur

KECAMATAN DUMOGA UTARA				
Presentase Desa/Kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Dumoga Utara
Presentase Perencanaan Pembangunan Desa yang terfasilitasi	Persen	60	70	Kecamatan Dumoga Utara
Presentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Dumoga Utara
KECAMATAN DUMOGA BARAT				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Dumoga Barat
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Dumoga Barat
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	Kecamatan Dumoga Barat
KECAMATAN LOLAYAN				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Lolayan
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Lolayan
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	Kecamatan Lolayan
KECAMATAN LOLAK				
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60,00	70,00	Kecamatan Lolak
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60,00	95,00	Kecamatan Lolak
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	Kecamatan Lolak

KECAMATAN DUMOGA TENGGARA				
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Dumoga Tenggara
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Dumoga Tenggara
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Dumoga Tenggara
KECAMATAN BOLAANG TIMUR				
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Bolaang Timur
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Bolaang Timur
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Bolaang Timur
KECAMATAN DUMOGA TENGAH				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Dumoga Tengah
Persentase perencanaan pembangunan desa yang terfasilitasi	Persen	60	70	Kecamatan Dumoga Tengah
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Dumoga Tengah
KECAMATAN PASSI BARAT				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Passi Barat
Persentase perencanaan pembangunan desa yang terfasilitasi	Persen	66,15	76,5	Kecamatan Passi Barat
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	93,17	98	Kecamatan Passi Barat

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

KECAMATAN BILALANG				
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Bilalang
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Bilalang
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Kecamatan Bilalang
KECAMATAN SANGTOMBOLANG				
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Sangtombolang
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	Persen	55,5	70	Kecamatan Sangtombolang
Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100		Kecamatan Sangtombolang
KECAMATAN BOLAANG				
Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang Terakomodir	Persen	60	70	Kecamatan Bolaang
Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	95	Kecamatan Bolaang
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	persen	80	90	Kecamatan Bolaang
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Persentase pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	100	100	KESBANGPOL

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	75	100	KESBANGPOL
Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persen	25	28	KESBANGPOL
persentase pelaksanaan Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	KESBANGPOL
Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	KESBANGPOL

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 juga memperhatikan program prioritas daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2025.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pada beberapa hal antara lain Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan dan Pergeseran antar rekening belanja. Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah (PD), secara rinci disajikan pada lampiran dokumen ini.

BAB VI

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 telah mengikuti sistem dan perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Agar proses pembangunan dapat terlaksana secara terpadu komprehensif dan tepat sasaran, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan daerah khususnya para kepala Perangkat Daerah harus senantiasa mengacu pada mekanisme penyusunan perencanaan yang berlaku.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 diperlukan sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan kedua (TW-I) Tahun 2025, terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, serta beberapa kondisi lain yang menyebabkan dokumen perencanaan tahunan yang telah disusun harus disesuaikan. Perubahan RKPD ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan

Legislatif. Nota kesepakatan KUPA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI